

EVALUASI SIMDA KEUANGAN DAN SIMBAPER PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018-2020

Rizka Nur Rahmawati
Politeknik Keuangan Negara STAN
rizkanur00@gmail.com

Abstract

The government accounting information system is a tool for producing quality financial reports. The Regional Government of Sragen Regency has implemented an accounting information system with the SIMDA and SIMBAPER applications to manage inventory used for operational activities. This study aims to find out how the implementation and quality of the inventory accounting information system that has been used in the SKPD. The discussion was carried out using descriptive qualitative methods with data from field research in the form of SIMDA Financial and SIMBAPER application practices, library research, and documentation. From the results of observations and interviews, no integration was found between SIMDA Finance and SIMBAPER. Therefore, the inventory accounting information system used by the SKPD needs evaluation and updating in order to produce higher-quality accounting information and financial reports.

Keywords: *Government accounting information system, SIMDA, SIMBAPER, Inventories*

Abstrak

Sistem informasi akuntansi pemerintah merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen telah menerapkan sistem informasi akuntansi dengan aplikasi SIMDA dan SIMBAPER untuk mengelola persediaan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan kualitas sistem informasi akuntansi persediaan yang telah digunakan pada SKPD tersebut. Pembahasan dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan data hasil penelitian lapangan berupa praktik aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMBAPER, penelitian kepustakaan, dan dokumentasi. Dari hasil pengamatan dan wawancara, tidak ditemukan adanya integrasi antara SIMDA Keuangan dan SIMBAPER. Oleh karena itu, evaluasi dan pembaharuan perlu dilakukan agar sistem informasi akuntansi persediaan yang digunakan oleh SKPD tersebut dapat menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah, SIMDA, SIMBAPER, Persediaan

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pendidikan merupakan pelayanan dasar yang utama bagi sebuah negara. Untuk memenuhi pelayanan dasar tersebut, pemerintah perlu memenuhi kebutuhan operasional berupa persediaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi persediaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dan kualitas sistem informasi akuntansi yang telah diterapkan oleh SKPD tersebut.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah maka, pemerintah daerah wajib menerapkan pencatatan dan pelaporan berbasis akrual. Konseptual dari Sistem Akuntansi Pemerintah ialah pelaporan keuangan. Pemerintah daerah wajib menatausahakan dan membuat laporan keuangan terkait seluruh kekayaan yang menjadi bagian dari APBD.

Persediaan merupakan bagian dari aset yang dimiliki oleh pemerintah

daerah. Posisi persediaan pada aktiva lancar memiliki peran yang penting untuk kegiatan operasional setiap satuan kerja. Persediaan sangat berisiko akan adanya kerusakan dan kehilangan. Kendala ini tentunya akan mengganggu kegiatan operasional pemerintah daerah. Sehingga, dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, perlu adanya tinjauan atas pelaksanaan penatausahaan, pencatatan dan pelaporan dari persediaan demi terciptanya *good governance*.

Persediaan adalah belanja pemerintah yang memiliki nilai ekonomi dan timbul dari kejadian masa lalu, dalam hal ini adalah pembelian maupun hibah. Manfaat ekonomi tersebut dapat digunakan untuk masa depan oleh pemerintah maupun masyarakat. Persediaan memiliki bentuk berupa barang atau perlengkapan yang dapat berguna untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah maupun barang-barang untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat.

Pengelolaan persediaan dikatakan sulit dan memiliki kemungkinan kesalahan dalam pencatatan. Jika hal ini terjadi maka kegiatan pelayanan pemerintah dapat terganggu (Sari, Suhairi, & Syofriyeni, 2021). Artinya,

pemerintah diharapkan dapat memenuhi persediaan untuk pelayanan dan operasional secara tepat, tidak *surplus* maupun kekurangan (Dahlia, Aliyah, & Mandasari, 2021).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas dan fungsi pada bidang pendidikan, olahraga, dan seni pelajar sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah luar biasa di Kabupaten Sragen. SKPD ini memiliki 20 Unit Pelaksana Tugas (UPT) pada 20 kecamatan yang dikenal dengan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang pendidikan. Persediaan yang ada pada SKPD ini memiliki jumlah yang cukup besar dan tersebar pada beberapa lokasi yaitu, 20 lokasi Koordinator Wilayah Kecamatan.

Kondisi ini tentunya menjadi sangat krusial dalam hal penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan pada satuan kerja tersebut. Jumlah persediaan yang terlampir pada LKPD Kabupaten Sragen tahun 2020 sebesar Rp 126.853.126. Sedangkan belanja persediaan SKPD ini mencapai Rp8.151.905.200. Dimana jumlah persediaan yang dimiliki oleh SKPD ini cukup besar.

Dengan terus berkembangnya kebutuhan dari suatu instansi dan jumlah persediaan yang dimiliki, maka diperlukan sistem yang baik untuk mengelolanya. Semakin banyak persediaan dan jumlah instansi, maka cara kerja sistem juga harus dirancang secara efektif dan efisien (Agustiningsih, Eka Putri, & Hernawati, 2021).

Dalam proses pengadaan hingga pelaporan persediaan, SKPD ini menggunakan sistem informasi akuntansi yang dikenal dengan SIMDA Keuangan dan SIMBAPER. SIMDA Keuangan telah digunakan sejak tahun 2007 sedangkan SIMBAPER digunakan sejak tahun 2018. Namun demikian, perlu adanya evaluasi dalam penerapan sistem tersebut. Oleh karena itu, penulis akan meninjau dan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan penatausahaan persediaan menggunakan SIMDA Keuangan dan SIMBAPER pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, didapatkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi persediaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen?

2. Bagaimana kualitas sistem informasi akuntansi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen?

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi persediaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
2. Mengetahui bagaimana kualitas sistem informasi akuntansi persediaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Menurut Wulandari & Octaviani (2020), sistem informasi akuntansi merupakan sebuah komponen atau sub sistem dari sebuah organisasi (satuan kerja) yang memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan dari informasi keuangan. Sistem ini memiliki manfaat untuk membantu pihak manajemen untuk membuat sebuah keputusan. Sistem ini dirancang untuk mendapatkan informasi keuangan yang dibutuhkan pihak internal dan eksternal dari suatu organisasi atau satuan kerja pemerintah.

Sistem ini akan menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Informasi ini diperoleh dari data yang telah dicatat, dikumpulkan, disimpan dan diolah. Dengan sistem informasi akuntansi, akan didapatkan bagaimana dan apa model penyimpanan persediaan yang baik. Selain itu, akan didapatkan informasi berupa cara mengelola persediaan mulai dari perencanaan, pembelian, penyimpanan, dan pengendalian penggunaan (Romney & Steinbart, 2016).

Sistem informasi akuntansi adalah alat yang akan menjembatani pemerintah daerah dalam proses pengelolaan keuangan hingga menyajikan laporan keuangan. Terdapat korelasi positif antara sistem informasi yang baik dengan laporan keuangan yang berkualitas. Semakin baik sistem informasi akuntansi maka akan semakin *reliable* laporan keuangan (Ikyarti & Aprilia, 2019).

Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Menurut (Romney & Steinbart, 2016), sistem informasi akuntansi memiliki enam komponen yang saling terkait dan saling berinteraksi satu sama lain demi tercapainya sebuah tujuan organisasi. Enam komponen tersebut antara lain:

- a. operator atau pengguna sistem;
- b. petunjuk teknis yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk memproses dan menghasilkan data;
- c. data yang berkaitan dengan organisasi dan aktivitas organisasi yang dilakukan;
- d. *software* yang digunakan untuk memproses dan mengolah data tersebut;
- e. infrastruktur teknologi informasi yang digunakan; dan
- f. sistem pengendalian internal pemerintah.

Sistem informasi akuntansi akan diukur sehingga menghasilkan sebuah hasil yang terukur. Sistem informasi akuntansi dikatakan berkualitas apabila seluruh unsur komponen akuntansi yaitu *hardware*, *software*, *brainware*, *telecommunication network*, *data base* yang berkualitas, dan *quality of work* dan *satisfaction of users* yang terintegrasi dan membentuk sebuah sistem akuntansi untuk menghasilkan informasi kepada pengguna (Syaifullah, 2010).

Semakin baik kualitas sistem informasi akuntansi dari sebuah organisasi maka akan menghasilkan *output* yang berkualitas. Dengan demikian, pengambilan keputusan dapat

dilakukan secara tepat dan semakin mengarah ke pada efisiensi organisasi tersebut (Sudarsono, 2015). Setiap *input* dokumen akan melalui proses berupa penjurnalan dan buku besar hingga menghasilkan *output* berupa laporan keuangan.

Mengutip teori McLeod dan George dalam (Syaifullah, 2010), kualitas dari sistem informasi akuntansi yang harus dipenuhi untuk meningkatkan nilai informasi adalah sebagai berikut:

- a. relevansi antar informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi, setiap informasi harus memberikan manfaat bagi pengguna informasi dan harus berkaitan dengan masalah yang sedang ditangani;
- b. akurasi antar informasi yang dihasilkan dan bebas akan kesalahan;
- c. ketepatan waktu dari informasi yang dihasilkan; dan
- d. kelengkapan dari informasi data yang dihasilkan oleh sistem, sehingga masalah dapat disajikan secara utuh dan dengan mudah menemukan solusi atas masalah.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

SIMDA merupakan bentuk dari penerapan *e-Government* yang diawali

dengan adanya *bigbang* UU otonomi daerah, UU paket keuangan negara, dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan dari pembuatan dan pengembangan aplikasi ini adalah untuk menyediakan basis data yang terpadu, menghasilkan informasi yang lebih komprehensif, tepat dan akurat, mempersiapkan birokrasi daerah yang lebih berkualitas dalam bidang teknologi, dan memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Tim Aplikasi SIMDA BPKP, 2020) .

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen mulai menggunakan SIMDA Keuangan pada tahun 2007 (Darmawan, 2010). Pada tahun 2007, SIMDA belum menggunakan sistem *database* online melainkan masih menggunakan sistem semi-online dengan mentransfer data melalui *flashdisk*. Tahun 2017 hingga saat ini SIMDA telah menggunakan sistem *database online* dan terintegrasi dalam implementasinya. SIMDA Keuangan, SIMDA Perencanaan, SIMDA SAKIP SIMDA Barang Milik Daerah, SIMDA Gaji dan SIMDA Pendapatan (Ole, 2014). Sedangkan SIMDA Keuangan didesain untuk mengintegrasikan proses penganggaran,

perbendaharaan, dan akuntansi dan pelaporan.

Sistem Informasi Barang persediaan (SIMBAPER)

SKPD ini menggunakan Sistem Informasi Barang Persediaan atau dikenal dengan SIMBAPER. SIMBAPER adalah sebuah aplikasi yang membantu operator pembantu pengurus barang persediaan dalam mengelola barang persediaan. Sistem ini merupakan terobosan baru pemerintah daerah yang digunakan pada tingkat SKPD dan Koordinator Wilayah Kecamatan.

SIMBAPER dibuat pada tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan mulai diterapkan pada setiap SKPD dan Koordinator Wilayah setiap SKPD secara bertahap. Seorang pegawai PNS ditunjuk sebagai operator untuk menatausahakan persediaan menggunakan SIMBAPER.

SIMBAPER memiliki menu (1) *home*; (2) *file*; (3) pengadaan; (4) penatausahaan; (5) *stock opname*; (6) penghapusan; (7) laporan; dan (8) *utility*. Pada menu *file*, operator dapat *input* data pagu anggaran dan data umum terkait pejabat penanggung jawab. Pada menu pengadaan, operator dapat melakukan *input* pengadaan persediaan dan penerimaan persediaan. Kemudian,

operator dapat melakukan penatausahaan pada menu penatausahaan, *stock opname*, dan penghapusan.

Output dari aplikasi SIMBAPER berupa kartu persediaan barang, laporan mutasi barang tiap bulan, laporan mutase barang semester, laporan mutasi barang tahunan, laporan rekapitulasi per SKPD, dan laporan rekapitulasi per barang. Laporan dapat diakses ketika akhir periode dan dapat digunakan untuk kepentingan manajerial dan digunakan untuk *update* saldo beserta pagu anggaran pada SIMDA Keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dan menghimpun sumber kepustakaan baik secara primer maupun sekunder (Darmalaksa, 2020). Data dan informasi yang dikumpulkan bertujuan untuk membentuk landasan teori yang akan dibutuhkan oleh penulis dalam menganalisis penelitian.

Selain itu, data juga akan dihimpun dari hasil wawancara dengan narasumber yang mengampu pada bidang pengelola keuangan dan barang. Hasil wawancara, pengamatan, dan praktik menggunakan aplikasi akan diamati dan dicatat secara

sistematik untuk diterjemahkan sebagai hasil penelitian (Hasanah, 2016). Penulis menggunakan data hasil *output* aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMBAPER tahun 2018-2020.

Penelitian dilakukan pada objek SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen yang berlokasi di Jl. Dr. Sutomo Nomor 2A, Beloran, Sragen, Jawa Tengah. SKPD ini memiliki tugas dan fungsi dalam pemberian pelayanan dasar pendidikan di daerah Kabupaten Sragen. SKPD ini telah menerapkan SIMDA Keuangan sejak 2007 dan SIMBAPER sejak 2018.

Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 masih mengancam dan prioritas utama adalah kesehatan, dalam penelitian ini penulis menghimpun data dengan cara melakukan wawancara secara langsung atau tatap muka dan secara *online* melewati pesan daring. Wawancara dilakukan kepada operator SIMDA Keuangan dan SIMBAPER. Teknik yang penulis gunakan untuk menghimpun data untuk penelitian dilakukan dengan cara:

1. penelitian lapangan;
2. penelitian kepustakaan; dan
3. dokumentasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yang dihimpun dari hasil wawancara dan sekunder, yaitu data yang dihimpun dari literatur, dokumen, laporan keuangan, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

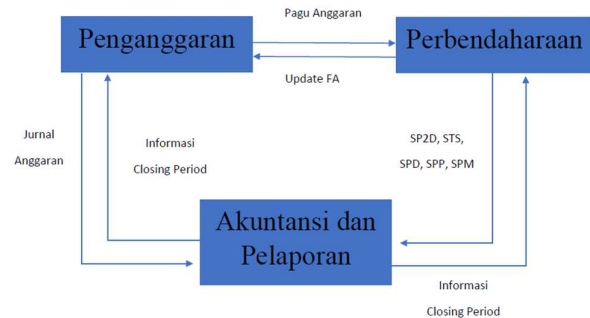
Metode analisis yang akan digunakan oleh penulis adalah metode analisis dekriptif. Dimana penulis akan menghimpun, menyusun dan mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data maupun hasil praktik secara langsung dalam penggunaan sistem informasi tersebut. Hal tersebut guna memberikan gambaran secara teratur dan terperinci serta mudah untuk dipahami mengenai keadaan atau gambaran terhadap peristiwa sehingga pembaca dapat memahami dan menarik kesimpulan.

4. PEMBAHASAN

Hubungan SIMDA Keuangan dengan SIMBAPER

SIMDA Keuangan didesain untuk mengintegrasikan proses penganggaran, perbendaharaan, dan akuntansi dan pelaporan. Hubungan dan *output* dari SIMDA Keuangan akan dibahas dalam bagian ini.

Gambar III. 2. Hubungan
SIMDA Keuangan



Sumber: diolah oleh penulis

Gambar III. 2. menjelaskan hubungan dan fungsi SIMDA Keuangan. Pada proses penganggaran akan menghasilkan dokumen *output* berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dokumen tersebut akan digunakan dalam proses perbendaharaan dalam satu periode akuntansi. Pada proses perbendaharaan akan memberikan *feedback* berupa *update funding availability*.

Pada proses perbendaharaan akan menghasilkan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai bukti penerimaan dan belanja. Dokumen ini akan menghasilkan jurnal pada proses akuntansi dan pelaporan. Proses akuntansi dan pelaporan akan memberikan *feedback* berupa informasi untuk penutupan periode.

Proses penganggaran akan menghasilkan *input* jurnal anggaran pada proses akuntansi dan pelaporan. Setelah tutup tahun, proses akuntansi dan pelaporan akan memberikan *feedback* berupa informasi penutupan periode. Pada proses akuntansi dan pelaporan akan menghasilkan jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan keuangan, perda pertanggungjawaban dan penjabarannya.

SIMDA Keuangan merupakan sistem informasi yang seharusnya terintegrasi dengan SIMBAPER secara *online*. Hubungan SIMDA Keuangan dengan SIMBAPER (Gambar III.3.) terjadi ketika:

1. proses penganggaran, menganggarkan pagu untuk belanja barang dan jasa (persediaan);
2. proses perbendaharaan, pembebanan terhadap pagu anggaran ketika BAST persediaan diterima;
3. proses akuntansi dan pelaporan, melakukan penjurnalan dan menghasilkan laporan keuangan.

Dari uraian hubungan SIMDA Keuangan dan SIMBAPER, setiap transaksi persediaan mulai dari penganggaran hingga pelaporan keduanya memiliki hubungan. Dengan adanya hubungan pada setiap transaksi maka mengharuskan adanya *transfer*

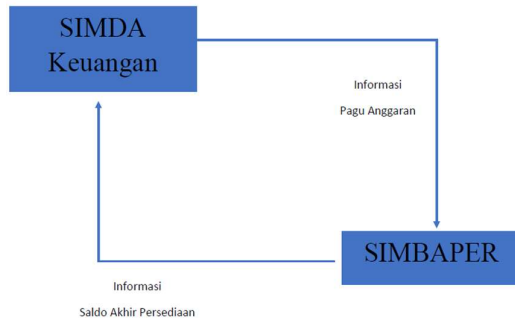
informasi data dari SIMBAPER kepada SIMDA Keuangan. *Transfer* dan *update* data juga dilakukan guna mengetahui saldo terbaru dari persediaan yang dimiliki setiap UPT.

Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan operator pembantu pengurus barang persediaan, sistem informasi yang digunakan masih terlalu rumit dan tidak mempersingkat waktu pekerjaan. *Input* dan *entry* data dilakukan secara manual per barang persediaan melalui *excel campus* yang kemudian akan *diimport* ke dalam aplikasi SIMBAPER. Dalam proses ini sering terjadi *error* dan ketidak sesuaian data yang *diinput* secara manual melalui *excel* dan data yang telah diproses oleh SIMBAPER. Sehingga operator perlu untuk melakukan pengecekan dan pengulangan pekerjaan.

Tentunya hal ini dinilai kurang sesuai dengan prinsip sistem informasi akuntansi dimana seharusnya sistem informasi mempermudah pekerjaan bagi pengguna (Syaifullah, 2010). Selain itu, sistem informasi akuntansi diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat sehingga dapat membantu pengambilan keputusan. Sedangkan data yang dihasilkan oleh aplikasi SIMBAPER, perlu untuk dilakukan

pengecekan secara manual sebelum masuk ke dalam aplikasi SIMDA Keuangan.

Gambar III. 3. Hubungan SIMDA dan SIMBAPER



Sumber: diolah oleh penulis hasil wawancara

Mengacu pada gambar III.3. dan penjelasan hubungan SIMDA Keuangan dengan SIMBAPER, informasi data yang dimiliki oleh sistem ini seharusnya saling berkaitan dan selalu ada *transfer* dan *update* secara periodik. Namun pada kenyataannya, data dari *output* yang dihasilkan oleh SIMBAPER tidak langsung tersedia pada SIMDA Keuangan. Kedua *software* pengelola keuangan ini tidak terintegrasi, sehingga perlu adanya pelaporan dan *update* data semi-online. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip sistem informasi akuntansi yang berkualitas. Dalam prinsipnya, sistem yang digunakan demi menghasilkan *output* yang berkualitas perlu adanya

pekerjaan yang berkualitas dan *satisfaction of user* yang terintegrasi.

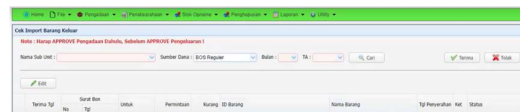
Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Persediaan

Dari gambaran umum hubungan SIMDA Keuangan dan SIMBAPER, sesuai dengan teori (Mc Leod & Schell, 2007), kualitas sistem informasi akuntansi persediaan ATK pada SKPD ini diuraikan sebagai berikut.

a. Relevansi

Sistem Informasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen belum memenuhi prinsip relevansi. Hal ini dikarenakan SIMDA dan SIMBAPER tidak terintegrasi, sehingga pengelola keuangan dan barang tidak mendapatkan kemudahan dalam hal penggunaan informasi. Hal ini digambarkan dengan menu (*tools*) yang dimiliki oleh SIMBAPER pada gambar IV.1 dan menu (*tools*) SIMDA Keuangan yang ditunjukkan pada gambar IV.2.

Gambar IV. 1. SIMBAPER



Sumber:

<https://simbaper.sragenkab.go.id/>

Gambar IV. 2. Menu laporan SIMDA Keuangan



Sumber: SIMDA Keuangan.

Dengan kedua sistem tersebut, pencatatan beban, hingga saldo akhir pada neraca dilakukan secara manual. Perlu perhitungan manual menggunakan aplikasi tambahan yaitu *excel* untuk menghitung beban kemudian saldo tersebut dicatat secara manual dalam jurnal akrual aplikasi SIMDA Keuangan seperti oleh gambar IV.3.

Gambar IV. 3. Input Data SIMDA Keuangan



Sumber: SIMDA Keuangan.

Sedangkan menurut teori Mc Leod dan George dalam teorinya (*Management Information Systems*),

menjelaskan bahwa relevansi yang seharusnya didapatkan dari sistem ini adalah kemudahan dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi tanpa perlu melewati fakta yang berhubungan.

Dalam hal ini, sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah tersebut belum dalam memenuhi dimensi pada teori Mc Leod dan George. Pengguna tidak dapat menggunakan data secara langsung melainkan menunggu operator pembantu pengurus barang persediaan untuk memberikan laporan hasil *stock opname* persediaan secara manual.

b. Akurasi

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, banyak ditemukan kesalahan dan *error* dalam penggunaan sistem maupun data yang dihasilkan oleh aplikasi SIMBAPER. Narasumber menyatakan bahwa sering mengalami *error* pada tahap *entry* data maupun tahap pengunduhan laporan yang dihasilkan. Hal ini sering kali membuat operator pembantu pengurus barang persediaan melakukan kerja berulang kali dan dianggap tidak efektif dan tidak efisien. Sedangkan menurut teori Mc Leod dan George sendiri, data yang dihasilkan seharusnya bebas dari kesalahan.

Idealnya data yang dihasilkan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Ketepatan

Berdasarkan wawancara, narasumber menyatakan bahwa data yang dihasilkan pada SIMBAPER sering berbeda dengan data dalam excel atau pekerjaan manual. Terdapat selisih saldo pada pengadaan maupun saldo akhir antara pengadaan dan pengeluaran kepada Korwil setempat. Hal ini kemudian menyebabkan operator harus melakukan kerja ulang dan memakan waktu cukup lama. Sehingga, laporan sering kali tidak tepat waktu. Sedangkan yang diharapkan dari sistem informasi yang baik salah satunya adalah ketepatan data dan waktu.

d. Kelengkapan

Narasumber menyatakan bahwa SIMBAPER dan SIMDA Keuangan sudah menyediakan fitur yang cukup lengkap dan menghasilkan beberapa laporan yang dibutuhkan oleh kuasa pengguna barang atau kepala SKPD untuk pengambilan keputusan. Laporan yang disajikan telah menyajikan informasi dan gambaran lengkap dari pelaksanaan anggaran atau belanja dan penggunaan persediaan selama satu periode akuntansi.

5. SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan simpulan sebagai berikut.

1. Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah dengan menggunakan SIMDA Keuangan dan SIMBAPER belum dikatakan baik.
2. Dengan menggunakan SIMDA Keuangan dan SIMBAPER dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan persediaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.

Saran dan Rekomendasi

Saran yang dapat diberikan oleh penulis agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, dapat memperbarui fitur dan sistem dari SIMDA Keuangan dan SIMBAPER sehingga kedua sistem dan/atau aplikasi ini dapat terintegrasi satu dengan lainnya. Selain itu, diharapkan dapat mengurangi tingkat ketidakakuratan yang disebabkan oleh proses *entry* maupun pengolahan data persediaan pada SIMBAPER.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, E., Eka Putri, R. J., & Hernawati, E. (2021). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Habis Pakai di Dinas Pendidikan Kota Bandung. *Jurnal Multimedia Networking Informatics Vo.7, No.2*, 104-112.
- Dahlia, Aliyah, M., & Mandasari, N. A. (2021). Penerapan Akuntansi Persediaan Obat-Obatan Berdasarkan PSAP No.05 pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA) Vol. 3 No. 2*, 163-175.
- Darmalaksa, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmawan. (2010). *Pengaruh Pentingnya Sistem, Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi Terhadap Kegunaan dan Kepuasan Pengguna dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Sragen*. Surakarta: Tesis: Univesitas Sebelas Maret.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi. *Jurnal at-Taqaddum, Volume 8 (1)*, 21-46.
- Ikyarti, T., & Aprilia, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi Vol. 9*, 131-140.
- Mc Leod, R. J., & Schell, G. P. (2007). *Management Information System. Tenth Edition. Upper Saddle River*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Ole, H. R. (2014). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara). *Journal Accountability*, 1-15.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi; Diterjemahkan oleh Kikin Sakinah Nur Safira, Novita Puspasari*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, P. I., Suhairi, & Syofriyeni, N. (2021). Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera. *Journal of Economics and Business*, 23-36.

- Sudarsono, A. R. (2015). Analisis Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna. *Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Syaifullah, M. (2010). Kualitas Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 10 (2)*, 136-150.
- Tim Aplikasi SIMDA (2020). *Gambaran Umum*. Diakses pada tanggal 15 April 2022, dari <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>
- Tim Aplikasi SIMDA. (2020). *Sejarah SIMDA*. Diakses pada tanggal 15 April 2022, dari <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/334/Sejarah-SIMDA.bpkp>
- Wulandari, D. R., & Octaviani, A. (2020). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Journal of Accounting and Financial*, 1-12.